

**RASIONALITAS INSTRUMENTAL DALAM KEBIJAKAN FISKAL: ANALISIS HILIRISASI SDA DAN PROGRAM MBG PERSPEKTIF JÜRGEN HABERMAS**

**Eugenius Besli<sup>1</sup>, Wilhelmus Kelvin<sup>2</sup>, Bartolomeus Da' o Lada<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Teknologi Kreatif, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Filsafat dan Teologi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Email Korespondensi: egibesli96@gmail.com

Email: kelvinwilhelmus87@gmail.com; ladabartolomeus@gmail.com

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the rational basis underlying the natural resource downstreaming policy and the Free Nutritious Meals (MBG) program in the Prabowo–Gibran administration, placing them in the perspective of Jürgen Habermas' instrumental rationality and communicative rationality. These two policies were chosen because they represent large-scale economic-political projects with significant fiscal implications and are concrete manifestations of the Asta Cita agenda. This study uses a qualitative method based on literature review by conducting a conceptual review and critical analysis of relevant academic literature, policy documents, and public reports. The results show that the downstreaming and MBG policies are predominantly guided by instrumental rationality oriented towards efficiency, accelerated investment, and expanded public spending. In the context of downstreaming, the emphasis on economic growth and industrial added value tends to overlook ecological risks and inequality in access to resources. Meanwhile, the implementation of the MBG program shows a centralistic pattern in budget management and a limited response to public criticism, even though this program absorbs significant fiscal resources. These findings indicate that fiscal policy management in both programs emphasizes technocratic calculations rather than participatory communicative deliberation. The dominance of instrumental rationality in high-cost policies has the potential to narrow the space for democratic legitimacy and weaken the quality of public financial management. Thus, this study emphasizes the importance of integrating fiscal efficiency and public deliberation in economic policy formulation so that development is not only technically rational but also democratically legitimate.

**Keywords:** Instrumental Rationality, Communicative Rationality, Fiscal Policy.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis basis rasionalitas yang mendasari kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemerintahan Prabowo–Gibran, dengan menempatkannya dalam perspektif rasionalitas instrumental dan rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas. Kedua kebijakan tersebut dipilih karena merepresentasikan proyek ekonomi-politik berskala besar dengan implikasi fiskal signifikan serta menjadi manifestasi konkret agenda Asta Cita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan melakukan telaah konseptual dan analisis kritis terhadap literatur akademik, dokumen kebijakan, serta laporan publik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi dan MBG lebih dominan dipandu oleh rasionalitas instrumental yang berorientasi pada efisiensi, percepatan investasi, dan ekspansi belanja publik. Dalam konteks hilirisasi, penekanan pada pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah industri cenderung mengesampingkan risiko ekologis dan ketimpangan akses sumber daya. Sementara itu, implementasi program MBG memperlihatkan pola sentralistik dalam pengelolaan anggaran dan respons yang terbatas terhadap kritik publik, meskipun program ini menyerap sumber daya fiskal yang besar. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan kebijakan fiskal dalam kedua program tersebut lebih menekankan kalkulasi teknokratis dibandingkan deliberasi komunikatif yang partisipatif. Dominasi rasionalitas

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

308

Indexed



SINTA 4



instrumental dalam kebijakan berbiaya besar berpotensi mempersempit ruang legitimasi demokratis dan melemahkan kualitas tata kelola keuangan publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara efisiensi fiskal dan deliberasi publik dalam perumusan kebijakan ekonomi agar pembangunan tidak hanya rasional secara teknis, tetapi juga sah secara demokratis

**Kata kunci:** Rasionalitas Instrumental, Rasionalitas Komunikatif, Kebijakan Fiskal.

## PENDAHULUAN

Pasangan Prabowo-Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 setelah memenangkan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 dan dilantik pada 24 Oktober 2024. Pemerintahan ini kemudian memperkenalkan visi pembangunan yang dikenal dengan Asta Cita. Dokumen tersebut menegaskan delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah legitimasi hukum, pendorongan kemandirian serta pemerataan ekonomi melalui hilirisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan harmoni sosial menuju masyarakat yang adil dan makmur (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2025). Kemenangan elektoral Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 dengan dukungan 58,59% suara (BBC News Indonesia 2024) tidak hanya menandai pergantian kepemimpinan nasional, tetapi juga membuka babak baru orientasi kebijakan ekonomi Indonesia. Melalui agenda Asta Cita, pemerintahan ini mengusung akselerasi pembangunan, hilirisasi sumber daya alam, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai motor pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua program ini tidak sekadar kebijakan sektoral, melainkan proyek ekonomi-politik berskala besar dengan implikasi fiskal yang signifikan dan jangkauan sosial yang luas. Hilirisasi dirancang melalui investasi masif yang mencapai Rp600 triliun di berbagai sektor strategis (Hafiez 2025), mulai dari pertambangan, energi, hingga perikanan dan pertanian. Sementara itu, program MBG diproyeksikan menjadi salah satu program belanja sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern dengan cakupan nasional dan kebutuhan anggaran yang sangat besar setiap tahunnya (BBC News Indonesia, 2026). Skala anggaran dan intensitas eksekusinya menunjukkan kuatnya orientasi pada efisiensi, percepatan, dan optimalisasi hasil.

Namun, dalam demokrasi modern, kebijakan ekonomi tidak hanya menyangkut efisiensi fiskal atau capaian pertumbuhan makroekonomi. Kebijakan ekonomi juga berkaitan erat dengan legitimasi publik, transparansi tata kelola anggaran, serta kualitas deliberasi dalam proses perumusan dan implementasinya (Cuadrado-Ballesteros and Bisogno 2021; Xiao and Wang 2024). Dominasi logika percepatan dan ekspansi investasi berpotensi mempersempit ruang dialog publik apabila tidak diimbangi dengan mekanisme partisipatif yang memadai. Ketegangan antara efisiensi dan legitimasi inilah yang menjadi ciri khas dinamika ekonomi-politik negara modern. Jürgen Habermas, melalui dikotomi rasionalitas instrumental dan rasionalitas komunikatif (Habermas 1984), menyediakan perangkat analitis untuk membaca dinamika tersebut. Dalam masyarakat modern, sistem ekonomi dan birokrasi cenderung beroperasi melalui rasionalitas instrumental yang berorientasi pada kontrol, kalkulasi, dan pencapaian tujuan secara efisien. Ketika logika sistem ini mendominasi tanpa diimbangi rasionalitas komunikatif yang bertumpu pada dialog dan konsensus, terjadi subordinasi ruang publik oleh kepentingan teknokratis (Haikal et al. 2026). Dalam konteks kebijakan hilirisasi dan MBG, kecenderungan ini tampak dalam penekanan pada target pertumbuhan, ekspansi investasi, dan percepatan implementasi, sementara kritik publik dan risiko sosial-ekologis sering kali ditempatkan sebagai variabel sekunder.

Dalam perspektif keuangan publik, kebijakan fiskal yang rasional tidak hanya diukur dari kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi atau mempercepat realisasi program, tetapi juga dari kualitas tata kelola anggaran, transparansi alokasi sumber daya, efektivitas belanja, serta keberlanjutan fiskal jangka panjang (Cuadrado-Ballesteros and Bisogno 2022; Megah S and Valiant S 2025). Kebijakan berbiaya besar seperti hilirisasi dan program MBG menuntut akuntabilitas yang tinggi karena bersumber dari dana publik yang terbatas dan memiliki *opportunity cost* terhadap sektor lain seperti

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Maguire, Persson, and Tinghög 2023; Persson and Tinghög 2020). Rasionalitas fiskal yang matang seharusnya mengintegrasikan kalkulasi efisiensi dengan evaluasi terbuka, partisipasi publik, dan mitigasi risiko sosial-ekologis. Orientasi kebijakan yang lebih menekankan percepatan dan ekspansi belanja tanpa penguatan deliberasi dan pengawasan publik memperlihatkan kecenderungan dominasi rasionalitas instrumental dalam pengelolaan keuangan negara.

Sejauh ini, kajian mengenai hilirisasi sumber daya alam umumnya berfokus pada aspek peningkatan nilai tambah industri, daya saing ekspor, dan strategi pertumbuhan ekonomi nasional (Arifin and Solihin 2025; Indrasari, Subagja, and Hakim 2024; Nurrahayu Prasetiani, Fadhilah Anindya, and Sainandira Yoshe 2024; Tsiwiyati 2024). Sementara itu, studi tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih banyak menekankan dimensi kesehatan masyarakat, penanggulangan stunting, serta dampak sosialnya terhadap kesejahteraan anak dan keluarga (Agustin et al. 2026; Amril and Sazali 2025; Arifin et al. 2025; Erinaldi, Ananta, and Nadhira 2025; Sari 2025). Namun, kedua kebijakan tersebut masih jarang dianalisis secara bersamaan dalam kerangka ekonomi-politik yang menelaah basis rasionalitas yang mendasari perumusan dan implementasinya. Lebih khusus lagi, belum banyak penelitian yang membaca kebijakan berimplikasi fiskal besar ini melalui dikotomi rasionalitas instrumental dan rasionalitas komunikatif sebagaimana dirumuskan oleh Jürgen Habermas, terutama dalam konteks pengelolaan investasi dan belanja publik di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis ekonomi-politik pembangunan dengan kerangka teori kritis Habermas untuk membaca kebijakan investasi dan belanja publik secara simultan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi orientasi rasionalitas yang menopang kebijakan hilirisasi dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam konteks ekonomi-politik pembangunan dan pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian ekonomi-politik kebijakan publik dengan mengintegrasikan Teori Rasionalitas Habermas ke dalam analisis kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini menempatkan hilirisasi dan MBG sebagai studi kasus untuk menilai efektivitas kebijakan tidak hanya dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga dari aspek legitimasi serta kualitas deliberatifnya dalam sistem demokrasi. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada upaya memperluas penerapan konsep rasionalitas Habermasian ke ranah kebijakan fiskal dan investasi negara. Upaya ini memperkaya diskursus tentang hubungan antara efisiensi ekonomi, tata kelola anggaran, dan legitimasi demokratis dalam konteks negara berkembang.

Jürgen Habermas (1984) membedakan dua orientasi rasionalitas dalam masyarakat modern, yakni rasionalitas instrumental dan rasionalitas komunikatif. Rasionalitas instrumental berorientasi pada kalkulasi sarana-tujuan, efisiensi, dan kontrol untuk mencapai hasil yang terukur. Rasionalitas ini dominan dalam sistem ekonomi dan birokrasi negara. Sebaliknya, rasionalitas komunikatif bertumpu pada tindakan yang diarahkan pada pencapaian saling pengertian melalui dialog, partisipasi, dan konsensus normative (Habermas 1984). Dalam konteks kebijakan publik, kedua bentuk rasionalitas ini membentuk dasar analitis untuk membaca bagaimana keputusan negara dirumuskan dan dilegitimasi. Dalam kerangka Habermasian, modernitas ditandai oleh kecenderungan dominasi logika system atas dunia kehidupan (*lifeworld*) yang berbasis komunikasi. Ketika kebijakan publik diperlakukan semata-mata sebagai persoalan teknis dan manajerial, terjadi apa yang disebut sebagai kolonisasi dunia kehidupan. Keputusan ekonomi kemudian dinilai rasional sejauh efektif secara administratif dan efisien secara fiskal, sementara dimensi partisipatif dan normatif cenderung terpinggirkan (Mokodompit, Abdussamad, and Ahmad 2025). Dominasi rasionalitas instrumental dalam praktik kebijakan ekonomi sering terwujud dalam bentuk teknokratisme. Teknokratisme menempatkan keahlian teknis, indikator kuantitatif, dan kalkulasi biaya-manfaat sebagai sumber utama legitimasi kebijakan (Gordon 2025). Dalam pendekatan ini, keberhasilan diukur melalui percepatan realisasi program, pertumbuhan ekonomi, dan optimalisasi anggaran. Namun, legitimasi demokratis tidak hanya bergantung pada efektivitas hasil, melainkan juga pada kualitas proses deliberatif yang menyertainya (Fathullah, Hidayat, and Pratama

2025; Mokodompit et al. 2025). Rasionalitas komunikatif menuntut transparansi, keterbukaan terhadap kritik, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan (Çamlı et al. 2021; Nugraheni, Ryadi, and Muljani 2023).

Hilirisasi sumber daya alam (SDA) merupakan strategi industrialisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas melalui proses pengolahan domestik sebelum diekspor (Arifin and Solihin 2025; Tsiwiyati 2024). Dalam literatur ekonomi pembangunan, hilirisasi dipahami sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah serta memperkuat struktur industri nasional melalui transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan negara (Puspitawati et al. 2025; Yuliani, Hermawan, and Suryana 2025). Dalam konteks kebijakan publik, hilirisasi kerap melibatkan investasi negara yang besar, insentif fiskal, serta regulasi yang mendorong pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri (Akhmadi 2024; Mu'min, Kartiko, and Anam 2025). Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya bersifat industrial, tetapi juga memiliki implikasi fiskal dan politik yang signifikan. Namun demikian, kebijakan hilirisasi berbasis ekstraksi sumber daya berisiko memperkuat pola pembangunan yang eksploitatif apabila tidak disertai tata kelola lingkungan dan distribusi manfaat yang adil (Pambudi 2025; Setiawan and Fadlhia 2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipahami sebagai bentuk belanja sosial negara yang berorientasi pada investasi sumber daya manusia. Dalam literatur keuangan publik, belanja sosial dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas *human capital*, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang (Ahuja and Pandit 2022; Alonso-Morales, Sáez-Martín, and Haro-de-Rosario 2025). Program pemberian makanan di sekolah (*school feeding program*) dikaitkan dengan perbaikan status gizi, peningkatan partisipasi pendidikan, serta dampak ekonomi tidak langsung melalui pemberdayaan rantai pasok lokal. Dari perspektif tata kelola keuangan publik, efektivitas program belanja sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan implementasi (Ahuja and Pandit 2022; Jam'iah H.A et al. 2024). Kebijakan berbiaya besar selalu mengandung *opportunity cost*, karena penggunaan sumber daya fiskal pada satu sektor berarti mengurangi ruang pembiayaan sektor lain. Oleh sebab itu, rasionalitas fiskal menuntut evaluasi terbuka terhadap desain kebijakan, mitigasi risiko administratif, serta keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa manfaat sosial yang dihasilkan sebanding dengan beban anggaran yang ditanggung (Agustini and Mulyani 2025). Dalam kerangka keuangan publik, program semacam ini tidak hanya dinilai dari tujuan normatifnya melainkan juga dari konsistensi antara perencanaan anggaran, sistem pengawasan, dan evaluasi berbasis data (Ayuni 2025).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan interpretatif terhadap kebijakan publik melalui kerangka teori kritis. Data penelitian bersumber dari laporan lembaga nasional dan internasional, publikasi akademik, serta pemberitaan media yang relevan dengan implementasi kebijakan hilirisasi dan program MBG. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen (*document analysis*) terhadap berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kerangka rasionalitas Jürgen Habermas, khususnya konsep rasionalitas instrumental dan rasionalitas komunikatif dalam proses pengambilan keputusan publik. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kecenderungan orientasi teknokratis dan instrumental dalam perumusan serta implementasi kebijakan, sekaligus menilai sejauh mana ruang deliberasi publik hadir dalam proses tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami dinamika hubungan antara rasionalitas kebijakan ekonomi pemerintah dan kualitas proses demokrasi deliberatif dalam praktik kebijakan publik di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Hilirisasi: Rasionalitas Investasi, Ekologi, dan Efisiensi Fiskal

Hilirisasi di era Prabowo-Gibran difokuskan pada percepatan industrialisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi (Arifin and Solihin 2025). Upaya ini mencerminkan orientasi yang kuat pada rasionalitas instrumental, dengan fokus pada efisiensi fiskal dan percepatan realisasi proyek (Haikal et al. 2026). Namun percepatan pembangunan tersebut secara nyata juga menimbulkan dampak negative terhadap kelestarian lingkungan. Auriga Nusantara melaporkan bahwa tingkat deforestasi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 257.000 hektar. Angka ini menunjukkan peningkatan deforestasi sebesar 4.191 hektar dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Auriga Nusantara 2025). Madani Insight dalam laporannya menjelaskan rencana alih fungsi lahan sebesar 20 juta hektare hutan untuk swasembada pangan dan energi (Naufal, Richwanudin, and Arizona 2025). Siaran pers Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang datanya diolah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperlihatkan bahwa pulau Sumatera sudah menjadi zona pengorbanan tambang minerba. Terdapat 1.907 wilayah yang termasuk dalam izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektar (JATAM 2025). Beberapa kasus tersebut memberikan gambaran tentang kekhawatiran terhadap degradasi lingkungan, hilangnya biodiversitas, serta dampak sosial terhadap masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada ekosistem hutan. Kritik ini menempatkan risiko ekologis sebagai isu serius sekaligus menyoroti sejauh mana pertimbangan lingkungan telah atau belum didialogkan secara publik dalam pengambilan kebijakan besar (Yusri, Wardi, and Evanita 2025).

Selain itu, struktur kebijakan hilirisasi menunjukkan dominasi perencanaan fiskal yang terpusat dan berorientasi target makro, termasuk alokasi dana besar melalui APBN untuk menarik investasi domestik dan asing (Mahani, Hendrati, and Wardaya 2025; Pohan et al. 2025). Pendekatan seperti ini sering kali mengesampingkan keterlibatan masyarakat lokal, analisis distribusi manfaat, dan evaluasi dampak lingkungan secara mendalam (Çamlı et al. 2021; Muthhar 2019; Rizqian 2024). Ketidakseimbangan tersebut merefleksikan kecenderungan teknokratisme dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana aspek deliberatif publik belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses keputusan. Pergeseran dari pendekatan kewilayahan dan komunitas lokal ke logika proyek nasional juga berpotensi mereduksi ruang dialog publik (Febriana 2025; Husen and Nugraha 2025). Ketika masyarakat lokal, akademisi, atau organisasi lingkungan tidak memiliki jalur kuat dalam perundingan kebijakan, legitimasi fiskal yang muncul terbatas pada legitimasi administratif dan bukan deliberatif. Di sinilah pentingnya membaca hilirisasi dengan kaca mata rasionalitas komunikasi untuk menilai apakah kebijakan ini benar-benar responsif terhadap risiko sosial-ekologis, atau sekadar didorong oleh logika efisiensi investasi.

Meskipun hilirisasi berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi industri, dan penyerapan tenaga kerja, fakta kritik terhadap implikasi ekologis menandakan bahwa orientasi kebijakan masih lebih condong pada rasionalitas instrumental (Febriana 2025; Husen and Nugraha 2025; Setiawan and Fadlhia 2025; WALHI 2025). Optimalisasi hasil fiskal dan percepatan proyek tampaknya mendominasi narasi pembangunan tanpa penguatan mekanisme deliberatif yang memadai. Hal ini membuka pertanyaan penting tentang bagaimana kebijakan fiskal besar dapat menyeimbangkan efisiensi dan legitimasi publik dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah lebih banyak menekankan angka investasi, nilai tambah, pertumbuhan PDB, serta percepatan proyek strategis nasional sebagai indikator keberhasilan. Sementara itu, perdebatan mengenai daya dukung ekologis, distribusi manfaat kepada masyarakat lokal, serta risiko ketergantungan pada kapital global cenderung berada di pinggiran diskursus kebijakan. Dominasi indikator kuantitatif dan target makroekonomi menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan lebih bertumpu pada performa teknokratis dibandingkan pada proses deliberatif yang inklusif. Dalam perspektif Habermas, situasi ini merefleksikan kolonisasi ruang publik oleh logika sistem.

## Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Ambisi Fiskal dan Tantangan Deliberatif

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran, dengan alokasi anggaran signifikan mencapai sekitar Rp335 triliun untuk 2026 dan target hampir 83 juta penerima manfaat (Nugraha 2025). Program ini dipandang sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, dengan tujuan mengurangi stunting sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masa depan melalui peningkatan status kesehatan anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lain (Nango et al. 2025). Meskipun program MBG memiliki tujuan yang dipandang berpotensi memberikan dampak positif, hal ini tidak serta-merta meniadakan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki implikasi fiskal yang sangat besar karena memerlukan alokasi anggaran negara dalam skala nasional dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau puluhan juta penerima manfaat, sehingga kebutuhan pembiayaannya diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun dalam APBN (Agustini and Mulyani 2025). Besarnya anggaran tersebut menuntut penyesuaian prioritas belanja negara, termasuk kemungkinan realokasi dari sektor lain atau peningkatan penerimaan negara. Di satu sisi, MBG dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang yang berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Namun di sisi lain, skala pembiayaan yang besar juga menimbulkan perdebatan mengenai keberlanjutan fiskal serta efektivitas penggunaan anggaran publik (Nissa et al. 2025; Pramesti et al. 2025). Selain itu, program MBG juga memiliki masalah lain dalam proses pelaksanaan.

Data Kemenkes per 5 Oktober 2025 menyebutkan bahwa sejak awal tahun 2025, kasus keracunan terkait MBG telah mencapai setidaknya lebih dari 11.000 orang (BBC News Indonesia 2025). Kasus keracunan yang diduga terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat bahwa dalam periode 1–13 Januari 2026 terdapat 1.242 orang yang diduga menjadi korban keracunan. Sementara itu, perhitungan BBC menunjukkan bahwa sepanjang Januari 2026 jumlah korban mencapai 1.929 orang (BBC News Indonesia, 2026). Berbagai laporan mengenai kasus keracunan dalam program ini menunjukkan adanya persoalan dalam pengendalian mutu serta penerapan standar operasional penyediaan makanan. Kondisi munculnya sejumlah kasus keracunan dalam skala besar menuntut dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Namun demikian, respons pemerintah terhadap opini publik dinilai belum optimal, yang tercermin dari lambannya tanggapan terhadap berbagai insiden yang terjadi. Hal ini membuat sejumlah lembaga seperti *Indonesia Corruption Watch*, FIAN Indonesia, jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, *Transparency International Indonesia*, dan Suara Ibu Peduli menolak program MBG karena selain keracunan massal, juga karena minimnya transparansi dan akuntabilitas serta tata kelola yang sentralistik dan militeristik (Transparency International Indonesia 2025).

Dalam kerangka rasionalitas deliberasi Habermas, setiap keputusan publik diandaikan harmonisasi antar subjek. Setiap subjek di dalamnya ikut berperan secara aktif dan terbebas dari dominasi agar tercapainya keputusan intersubjektif dengan hak-hak partisipatif dijunjung tinggi (Muttaqien and Ramdan 2023). Berhadapan dengan program MBG, keputusan intersubjektif belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya respon pemerintah dalam mengakomodasi opini publik. Selain itu, program MBG fokus pada output kuantitatif seperti jumlah penerima manfaat atau realisasi anggaran tanpa simultan memperkuat pengawasan dan sistem pemantauan berpotensi menempatkan program pada ranah teknokratis yang sempit.

Meskipun dirancang sebagai investasi sosial jangka panjang, desain dan evaluasi program lebih banyak ditekankan pada capaian kuantitatif dibandingkan kualitas proses deliberatif yang menyertainya. Kritik publik terkait kualitas makanan, risiko tata kelola, dan dampak fiskal jangka panjang belum sepenuhnya direspons melalui forum komunikasi terbuka yang sistematis. Kecenderungan ini

memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan lebih diukur melalui ekspansi administratif dan efektivitas distribusi, bukan melalui legitimasi yang lahir dari diskursus publik. Dalam konteks tersebut, MBG memperlihatkan orientasi rasionalitas instrumental yang dominan, di mana kebijakan sosial diperlakukan sebagai proyek manajerial berskala besar yang harus segera direalisasikan, meskipun ruang refleksi kritisnya relatif terbatas.

## **Dominasi Rasionalitas Instrumental: Implikasi bagi Demokrasi Fiskal**

Analisis atas kedua kasus kebijakan tersebut memperlihatkan pola dominasi rasionalitas instrumental dalam perumusan dan implementasi kebijakan fiskal berskala besar. Kebijakan hilirisasi lebih dipandu oleh target investasi dan efisiensi proyek besar, sementara MBG berorientasi pada perluasan layanan sosial melalui alokasi anggaran sangat besar (Ahuja and Pandit 2022; Arifin and Solihin 2025; Haikal et al. 2026; Nugraha 2025). Dalam kedua kasus ini, pertimbangan deliberatif masih kurang menonjol dalam tata kelola kebijakan. Dominasi teknokratisme dalam kebijakan fiskal besar menunjukkan bahwa legitimasi yang muncul seringkali administratif dan berbasis output kuantitatif, bukan berdasarkan konsensus publik yang luas (Gordon 2025). Ketika proses deliberatif tidak terintegrasi secara kuat, masyarakat mempunyai ruang yang terbatas untuk menguji validitas kebijakan dari sisi sosial-ekologis maupun distribusi manfaatnya. Hal ini dapat memunculkan kritik dan resistensi sosial yang pada gilirannya mencederai kualitas demokrasi fiskal.

Dalam konteks demokrasi fiskal yang ideal, kebijakan publik yang berdampak luas seharusnya mencakup mekanisme evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, komunitas lokal, akademisi, dan sektor swasta, sehingga keputusan kebijakan tidak hanya bersandar pada logika teknis atau efektivitas (Muhammad, Firdaus, and Aci 2023; Nelly 2024). Keterbukaan terhadap kritik serta ruang dialog publik menjadi aspek penting untuk memastikan legitimasi yang lebih holistik. Lebih jauh, dominasi rasionalitas instrumental dalam kedua kebijakan tersebut menunjukkan pola pemerintahan yang menempatkan teknokrasi sebagai fondasi utama legitimasi publik. Keberhasilan diukur dari kecepatan implementasi, serapan anggaran, dan pencapaian target makro, sementara dimensi partisipatif cenderung bersifat komplementer. Dalam kerangka Habermasian, kondisi ini memperlihatkan kecenderungan sistem politik dan ekonomi menguatkan dirinya melalui mekanisme administratif dan fiskal, sehingga ruang publik deliberatif tidak sepenuhnya menjadi arena pembentukan legitimasi (Herman 2023; Muthhar 2019).

Kecenderungan tersebut bukan berarti kebijakan hilirisasi dan MBG tidak memiliki nilai strategis. Namun, ketika rasionalitas instrumental menjadi kerangka dominan tanpa keseimbangan rasionalitas komunikatif, kebijakan berisiko kehilangan dimensi emansipatorisnya (Dona, Novela, and Nur 2025; Santoso et al. 2025). Kebijakan publik berubah menjadi instrumen teknis yang berorientasi pada output, bukan pada pembentukan konsensus rasional yang inklusif. Dalam jangka panjang, pola ini dapat melemahkan kualitas demokrasi fiskal, karena masyarakat diposisikan lebih sebagai objek penerima kebijakan daripada subjek yang terlibat dalam pembentukan arah pembangunan (Gordon 2025; Putra 2023). Dengan demikian, baik hilirisasi maupun MBG selama pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan kecenderungan kuat pada rasionalitas instrumental sementara integrasi deliberatif masih terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan ke depan bukan hanya pada efektivitas kebijakan, tetapi pada bagaimana rasionalitas teknokratis dapat diseimbangkan dengan legitimasi komunikatif agar pembangunan ekonomi dan sosial tetap berada dalam koridor demokrasi yang substantif.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa pemerintahan Prabowo–Gibran lebih banyak digerakkan oleh rasionalitas instrumental yang berorientasi pada efisiensi ekonomi, percepatan investasi, dan ekspansi

belanja publik. Dalam kerangka pemikiran Jürgen Habermas, orientasi tersebut menempatkan kebijakan publik terutama sebagai instrumen teknokratis untuk mencapai target pertumbuhan dan stabilitas fiskal. Akibatnya, ruang deliberasi publik yang memungkinkan partisipasi masyarakat, pertimbangan ekologis, serta diskursus kritis mengenai dampak sosial menjadi relatif terbatas. Hal ini terlihat dalam implementasi kebijakan hilirisasi yang menitikberatkan peningkatan nilai tambah industri serta dalam program MBG yang menyerap anggaran besar. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa dominasi rasionalitas instrumental dalam kebijakan fiskal berpotensi mengurangi kualitas deliberasi demokratis dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka sehingga analisis terutama bertumpu pada interpretasi literatur, dokumen kebijakan, dan laporan publik yang tersedia. Penelitian ini juga belum melibatkan data empiris lapangan, seperti wawancara dengan pembuat kebijakan, pelaku industri, atau masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan hilirisasi dan program MBG. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan konseptual dengan penelitian empiris agar dapat mengkaji secara lebih mendalam bagaimana proses deliberasi publik berlangsung dalam praktik kebijakan ekonomi.

## REFERENSI

- Agustin, Ira, Evi Damayanti, Annisa Nur Ardiani, Hilwa Azkiya Hasibuan, Vazira Nurul Assyfa, and Romiza Arika. 2026. "Strategi Integrasi Program Makan Bergizi Gratis Dengan Sistem Ketahanan Pangan Untuk Mengatasi Masalah Stunting Dan Malnutrisi." 5(1):926–34.
- Agustini, Ucu, and Sri Mulyani. 2025. "Efektivitas Dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Kiprah Pendidikan* 4(3):362–68. doi: 10.33578/kpd.v4i3.p362-368.
- Ahuja, Deepti, and Deepak Pandit. 2022. "Social Spending as a Development Tool: Evidence from Developing Countries." *European Journal of Government and Economics* 11(1):73–96. doi: 10.17979/ejge.2022.11.1.7385.
- Akhmadi, Fauzan. 2024. "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *HATTA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* 2(1):824–35. doi: 10.71128/kybernology.v2i2.185.
- Alonso-Morales, Natalia, Alejandro Sáez-Martín, and Arturo Haro-de-Rosario. 2025. "The Role of Local Public Spending in the Achievement of the Social Dimension of Sustainable Development: An Empirical Analysis." *Sustainable Futures* 9(October 2024). doi: 10.1016/j.sfr.2025.100475.
- Amril, Amril, and Hasan Sazali. 2025. "Formulasi Regulasi Dan Kebijakan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan: Studi Pada Program Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6(3):1670–79. doi: 10.63447/jimik.v6i3.1566.
- Arifin, Antoni Ludfi, and Dadang Solihin. 2025. "Hilirisasi Pangan Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Kewirausahaan* 5(2):19–27.
- Arifin, Syuja' Rafiqi, Ikeu Tanziha, Ikeu Ekayanti, and Aripin Ahmad. 2025. "The Impact of a Free Nutritious Meal Program on Elementary School Students' Concentration Levels." *Action: Aceh Nutrition Journal* 10(3):790. doi: 10.30867/action.v10i3.2737.
- Auriga Nusantara. 2025. "Status Deforestasi Indonesia 2024." <https://Auriga.or.Id/>.
- Ayuni, Dinda Tri. 2025. "Dilema Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pada Siswa." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 8(8):1–9.
- BBC News Indonesia. 2024. "Hasil Final Rekapitulasi Ruara Pilpres Dan Pileg 2024." *BBC News Indonesia*.
- BBC News Indonesia. 2025. "MBG: Ribuan Kasus Keracunan, Sejumlah Sekolah Kelola Dapur Mandiri." *Bbc.Com*.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

315

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



- BBC News Indonesia. 2026a. "MBG: Korban Keracunan MBG Sepanjang Januari 2026 Hampir 2.000 Pelajar, Mengapa Terus Terjadi?" *Bbc.Com*.
- BBC News Indonesia. 2026b. "MBG Digugat Ke MK Karena 'memakan' Sepertiga Dana Pendidikan – Seberapa Mungkin Dikabulkan? - BBC News Indonesia." *BBC News Indonesia*.
- Çamlı, Ahmet Yavuz, Florina Oana Virlanuta, Bedrettin Türker Palamutçuoğlu, Nicoleta Bărbuță-Mișu, Şeref Güler, and Deniz Züngün. 2021. "A Study on Developing a Communicative Rational Action Scale." *Sustainability (Switzerland)* 13(11):1–24. doi: 10.3390/su13116317.
- Cuadrado-Ballesteros, Beatriz, and Marco Bisogno. 2021. "Budget Transparency and Financial Sustainability." *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 34(6):210–34. doi: 10.1108/JPBAFM-02-2022-0025.
- Cuadrado-Ballesteros, Beatriz, and Marco Bisogno. 2022. "Budget Transparency and Financial Sustainability." *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* 34(6):210–34. doi: 10.1108/JPBAFM-02-2022-0025.
- Dona, Rahma, Devina Novela, and Aisyah Nur. 2025. "Rasionalitas Instrumental Dan Dominasi Sistemik Dalam Masyarakat Digital: Perspektif Neo-Marxis Dan Teori Kritis Frankfurt Terhadap Perkembangan Konseptual Masyarakat Kontemporer." *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement* 4(1):281–98.
- Erinaldi, Dhea Nabila Putri Ananta, and Syarifah Nadhira. 2025. "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus Pada SMA Swasta Lancang Kuning Kota Dumai)." *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis* 7(2):335–49.
- Fathullah, Abdusyahid Naufal, Muhamad Alief Hidayat, and Andre Arya Pratama. 2025. "Digital Transformation of Public Participation in Indonesia's Constitutional System: The Effectiveness of the Indonesian House of Representatives' Aspiration Channel as an Instrument of Participatory Democracy." *Constitutionale* 6(1):67–78. doi: 10.25041/constitutionale.v6i1.4635.
- Febriana, Eci. 2025. "Mitigasi Konflik Pada Proyek Food Estate: Perspektif Sosial-Ekologis Masyarakat Lokal Di Indonesia Timur." *Global Research and Innovation Journal* 1(2):683–93.
- Gordon, Cameron Elliott. 2025. "Technocracy." *Encyclopedia* 5(4).
- Habermas, Jürgen. 1984. *The Theory of Communicative Action (Translated by Thomas McCarthy)*. Boston: Beacon Press.
- Hafiez, Fachri Audhia. 2025. "Prabowo Perintahkan Percepat 18 Proyek Hilirisasi Senilai Rp600 Triliun." *Metrotvnews.Com*.
- Haikal, Rifky Sandi, M. Ade Ilham, Mardihah Abbas, and Ilham Arifin. 2026. "Pemikiran Filsafat Jürgen Habermas Dalam Mengkaji Kolonisasi Dunia Kehidupan Di Era Digital." *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 3(1):257–71.
- Herman, Barbara. 2023. "Duty and Deontology." *Canadian Journal of Philosophy* 53(4):289–300. doi: 10.1017/can.2024.5.
- Husen, Ivana Mutmainah, and Imam Fadhil Nugraha. 2025. "Gerakan Masyarakat Adat Tobelo Dalam Upaya Menekan Kebijakan Pengelolaan Tambang PT.IWIP Di Halmahera." *Jurnal Hubungan Internasional* 18(2):343–60. doi: 10.20473/jhi.v18i2.75341.
- Indrasari, Orima, Iwan Kuniawan Subagja, and Azis Hakim. 2024. "Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Agro Yang Berkelanjutan." *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 6(2):885–99.
- Jam'iah H.A, Sitti, Gde Made Dwi Praditya Rahadi, A. Indrianti Ismunandar, Darmawati, and Nirwana. 2024. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Makassar." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3(4):2065–74.
- JATAM. 2025. "Dari Hulu Yang Robek Ke Kampung Yang Tenggelam: Banjir Sumatera Dan Ledakan Izin Ekstraktif." *Jatam.Org*.

- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2025. "RPJMN 2025-2029: Fondasi Awal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045." *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*.
- Maguire, Allegra, Emil Persson, and Gustav Tinghög. 2023. "Opportunity Cost Neglect: A Meta-Analysis." *Journal of the Economic Science Association* 9(2):176–92. doi: 10.1007/s40881-023-00134-6.
- Mahani, Khadijah, Ignatia Martha Hendrati, and Wirya Wardaya. 2025. "The Impact Of Downstream Policies On The Growth Of Indonesia's Net Exports Of Iron And Steel (HS 72)." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 13(3):2887–98. doi: 10.37676/ekombis.v13i3.7599.
- Megah S, Karina Indri, and Roy Valiant S. 2025. "Sytematic Literature Review : Assessing the Effectiveness of Performance-Based Budgeting in Government Financial Management." *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 10(1):52–74. doi: 10.24905/jip.10.1.2025.52-74.
- Mokodompit, Rahmat, Zamroni Abdussamad, and Ahmad Ahmad. 2025. "Mengonseptualisasi Prinsip Meaningful Participation Melalui Kerangka Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas : Analisis Terhadap Putusan MK." *Journal of Contemporary Law Studies Volume: 3*(1):113–36.
- Mu'min, M. Silahul, Nafis Dwi Kartiko, and Muhammad Syariful Anam. 2025. "Dampak Hilirisasi Industri Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Hijau Inklusif." *Jurnal Ekonomi KIAM* 36(2):55–78. doi: 10.25299/kiat.2025.25093.
- Muhammad, Kaharuddin, Sunny Ummul Firdaus, and Muhammad Hasrul La Aci. 2023. "Kebijakan Publik Dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan Untuk Masyarakat." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2(4):2023.
- Muthhar, Moh Asy'ari. 2019. "Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia." *USHULUNA: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 49–72.
- Muttaqien, Muhammad Erysyad, and Deden Ramdan. 2023. "Konsep Komunikasi Jürgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 6(1):2023.
- Nango, Marselina, Budi Purwoko, Muffarihul Hazim, and Karwanto. 2025. "Makan Bergizi Gratis : Strategi Kebijakan Publik Menuju Generasi Emas Indonesia 2045." *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)* 25(2).
- Naufal, Fadli Ahmad, Sadam Afian Richwanudin, and Riza Egi Arizona. 2025. *Ekspansi Tanpa Refleksi: Kritik Atas Kebijakan Pembukaan Lahan 20 Juta Hektar*. Vol. 1.
- Nelly, Samsiah. 2024. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik." *Jurnal Sociopolitico* 6(1):86–94.
- Nissa, Afrija Khoirun, Mellyana Candra, Tisya Humairoh, and Serli Gusyuliandari. 2025. "Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Analisis Ekonomi Politik Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus: SMP Negeri 4 Tanjungpinang." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2(11):33–37.
- Nugraha, Dimas Waraditya. 2025. "MBG: Landai Di Realisasi 2025, Meroket Di Alokasi 2026." *Kompas.Com*.
- Nugraheni, Yuli, Agustinus Ryadi, and Benedicta D. Muljani. 2023. "Interpreting the Transparency As a Communicative Action in the Jürgen Habermas Perspective." *P.A. Persona e Amministrazione* 12(1):631–49. doi: 10.14276/2610-9050.4303.
- Nurrahayu Prasetiani, Diajeng, Hannah Fadhilah Anindya, and Adine Sainandira Yoshe. 2024. "Strategi Menghadapi Middle Income Trap: Dampak Hilirisasi Mineral Terhadap Pendapatan Negara Indonesia Era Joko Widodo." *Indonesia Foreign Policy Review* 11(1):37. doi: 10.5281/zenodo.14562414.
- Pambudi, Priyaji Agung. 2025. "The Paradox of Nickel Investment in Indonesia." *Environmental Pollution Journal* 5(3):299–319.

- Persson, Emil, and Gustav Tinghög. 2020. "Opportunity Cost Neglect in Public Policy." *Journal of Economic Behavior & Organization* 170(6):301–12. doi: 10.1016/j.jebo.2019.12.012.
- Pohan, Choirul Rohmiyanti, Laga Sugiarto, Arif Hidayat, and Martitah Martitah. 2025. "The Paradox of Mineral Downstreaming: An Economic Analysis of Mining Regulatory Disharmony in Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum E-ISSN: 7(1):519–43*.
- Pramesti, Retta Farah, Asno Azzawagama Firdaus, Khairanis Yulita, and Mazraatin Thooyibah. 2025. "Analisis Efisiensi APBN Era Prabowo: Kajian Ekonomi Dan Analisis Sentimen Publik." *Jesya* 8(2):1147–61. doi: 10.36778/jesya.v8i2.2054.
- Puspitawati, Eka, Nanda Rembulan Nurdianto, Andika Pambudi, Muhammad Royhan Alamsyah, Kumala Anindya Pakerti, and Nur Dita Maharani. 2025. "Economic Effect of Biodiesel Downstream Industry: An Analysis Based on a Dynamic CGE Model." *International Journal of Energy Economics and Policy* 15(1):437–46. doi: 10.32479/ijeep.17428.
- Putra, Fadillah. 2023. "Village Governance and Public Participation in Indonesia Fadillah." *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study* 3(2):88–100.
- Rizqian, Dimas Rahman. 2024. "Ruang Publik Deliberatif Digital: Analisis Platform Symbolic ID Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas." *Jurnal Sosial Politik Dan Hukum* 2(1):12–16.
- Santoso, Aris Prio Agus, Tata Mahyuvi, Dhyhan Andika Irawan, and Puput Mulyono. 2025. "Pengembangan Model Teori Hukum 'PERKUTUT': Menuju Paradigma Hukum Berbasis Keseimbangan Etis Dan Transedensi Sosial." *Sanskara Hukum Dan HAM* 4(01):178–86. doi: 10.58812/shh.v4i01.598.
- Sari, Sarah Meirina. 2025. "Implementation of the Free Nutritious Meal Policy in Bondowoso Regency." *Journal Publicuho* 8(3):1898–1907. doi: 10.35817/publicuho.v8i3.896.
- Setiawan, Roy, and Maudy Noor Fadlhia. 2025. "Green But Extractive: Diplomasi Hilirisasi Nikel Indonesia Dan Politik Eksklusi Sosial Di Weda Bay." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 5(1):1–17. doi: 10.51622/jispol.v5i1.2721.
- Transparency International Indonesia. 2025. "Aksi Koalisi Gerak Warga Tolak MBG Ribuan Anak Jadi Korban, Program Harus Dihentikan! – Transparency International Indonesia." <https://Ti.or.Id/>.
- Tsiwiyati, Dwi Najah. 2024. "Transformasi Industri Kelapa Sawit: Hilirisasi Berkelanjutan Menghadapi Daya Saing Global Dan Ekonomi Hijau." *Jurnal Esensi Hukum* 6(2):443. doi: 10.36841/growth-journal.v2i2.3971.
- WALHI. 2025. *Bahaya Rencana Pembukaan 20 Juta Hektar Hutan Untuk Pangan Dan Energi*.
- Xiao, Hanyu, and Xiaohu Wang. 2024. "Fiscal Transparency Practice, Challenges, and Possible Solutions: Lessons from Covid 19." *Public Money and Management* 44(3):196–207. doi: 10.1080/09540962.2023.2175232.
- Yuliani, Fitria, Hari Hermawan, and Esty Asriyana Suryana. 2025. "Kebijakan Hilirisasi Dalam Rangka Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Internasional." *Journal of Trade Development and Studies* 9(2):113–30.
- Yusri, Nori, Yunia Wardi, and Susi Evanita. 2025. "Komunikasi Dalam Perencanaan Pembangunan : Suatu Kajian Kritis Dalam Konteks Kebijakan Lingkungan Dan Partisipasi Publik." *Jurnal Salingka Nagari* 04(1):91–104.